**BAB II**

**KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA DALAM KONTEKS EKONOMI PERDAGANGAN BEBAS**

**A. KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA DI BIDANG EKONOMI PERDAGANGAN**

 Selama periode Januari-April 2011, nilai ekspor Indonesia ke Singapura mencapai US$3,64 miliar atau tumbuh 17,8 persen dibanding periode sama 2010 senilai US$3,09 miliar. Ekspor ke Singapura ini lebih tinggi dibanding ke Malaysia sebesar US$3,19 miliar dan Thailand US$2,18 miliar.

Namun, ekspor nonmigas untuk bulan April 2011 jika dibandingkan dengan Maret 2011 ke sebagian besar negara tujuan utama terjadi penurunan. Ekspor Indonesia ke Singapura selama periode itu turun sebesar US$1,6 juta

Penurunan serupa juga terjadi untuk ekspor Indonesia ke Thailand yang turun US$643,5 juta dan Malaysia sebesar US$74,5 juta. Sementara itu, untuk impor nonmigas dari Singapura selama Januari-April 2011 mencapai US$3,44 miliar atau naik 2,51 persen dibanding periode sama 2010 senilai US$3,35 miliar. Namun, nilai impor dari Singapura tersebut masih lebih rendah dibanding Thailand yang mencapai US$3,48 miliar, tapi lebih tinggi dibanding Malaysia US$1,75 miliar.

Khusus untuk bulan April 2011, nilai impor nonmigas dari Singapura tercatat mencapai US$917 juta atau 8,34 persen dari total impor dari negara-negara lain. Namun, nilai impor ini masih lebih tinggi dibanding Thailand sebesar US$904,4 juta (8,22 persen) dan Malaysia US$501,6 juta (4,56 persen). Jika dilihat dari data BPS tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan sekitar US$200 juta dengan Singapura.[[1]](#footnote-1) Dan Berikut penulis melampirkan data neraca perdagangan antara Indonesia dan Singapura dalam ribu US$

**1. Sejarah bilateral antara Indonesia dan Singapura**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura dilakukan secara resmi pada bulan September 1967, yang dilanjutkan dengan pembukaan kedutaan besar masing-masing negara. Secara politik, pada dasarnya hubungan Indonesia dan Singapura mengalami fluktuasi didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara, namun demikian kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, pragmatis dan strategis.

Indonesia dan Singapura masing-masing memiliki peran yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam efektivitas ASEAN meskipun kedua negara ini memiliki luas teritorial, jumlah populasi, serta pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara.

Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, terdapat komplementaritas kepentingan diantara kedua negara. Di satu pihak, Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia, namun sebagai negara kecil, Singapura tidak mempunyai luas wilayah (*space*), sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*manpower*) yang mencukupi untuk dapat ditawarkan oleh Indonesia, yakni dalam konteks hubungan yang setara, adil, dan menguntungkan.

Sebagai salah satu negara tetangga terdekat secara geografis, Indonesia dan Singapura perlu membina dan memperkuat hubungan bilateral yang seimbang dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, non-intervensi, penghormatan terhadap kemerdekaan politik serta integritas wilayah masing-masing. Dalam kaitan ini, hubungan Indonesia dan Singapura yang erat tersebut jelas diperlukan guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan keamanan dan pembangunan nasional RI.

Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kespakatan kesepakatan susbtansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara.

Dalam bidang politik, paralelisasi antara tiga perundingan perjanjian yakni perjanjian pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan *counter terrorism* mengindikasikan hubungan yang baik dan sekaligus mengundang pro dan kontra dari berbagai elemen. Pada perjanjian di bidang politik dan perjanjian di bidang pertahanan, langkah simbolis dalam Pertemuan Langkawi 14-15 Mei 2007 mengejutkan berbagai pihak. Dua minggu sebelum KTT ini orang dikagetkan akan lompatan hubungan Indonesia dan Singapura, yaitu dengan diselesaikannya Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA). Tampak Siring menjadi saksi sejarah berikutnya setelah Langkawi. Tampak Siring mengakhiri penantian itu. 30 tahun berlalu sudah, ditutup dengan penandatanganan perjanjian pada tanggal 27 April 2007.

Perjanjian ekstradisi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura pada 27 April 2007 lalu juga merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Perjanjian ini akan menjadi malapetaka bagi tersangka kasus BLBI yang berlindung atas ketiadaan kesepakatan kedua negara mengenai ekstradisi seperti: Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Samadikun Hartono, Prajogo Pangestu, Hendra Rahardja, Sherny Konjongiang, Eko Adi Putranto, dan David Nusa Wijaya (ICW, 2003). Ditambah lagi dengan rencana akan diterapkannya prinsip berlaku surut dalam perjanjian ini, tentunya akan semakin menambah daya untuk memaksa pulang para buronan BLBI ke Indonesia. Selain itu, juga akan berpotensi untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka bawa lari yang jumlahnya sangat besar, yaitu Rp 180 trilyun (Kompas, 23 Januari 2003) dan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perjanjian ekstradisi ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada hanya sebagai langkah pemberantasan korupsi.

Selain menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi, perjanjian ekstradisi ini juga akan membawa dampak positif bagi usaha agar tidak terjebak dalam krisis lagi. Upaya penegakkan hukum (pemberantasan korupsi) merupakan tahapan penting bagi proses ini, terutama pelaksanaan proses hukum bagi koruptor yang lari ke luar negeri (Singapura). Hal ini terkait dengan usaha pengembalian aset-aset negara di luar negeri yang dimungkinkan bila para koruptor bisa dipulangkan dan diproses secara hukum. Hal itu sulit dilakukan karena sebagian besar koruptor melarikan diri ke luar negeri beserta uang jarahannya. Besarnya *capital outflow* yang merupakan indikasi larinya uang rakyat ke luar negeri karena terjadi bersamaan dengan proses restrukturisasi perbankan bisa terlihat dalam kasus ini.

Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, maka sejarah panjang ke arah ini terbentang lebar sejak tahun 1964 hingga ketika mencuatnya kasus penggelapan dana BLBI. Proses-proses yang mengikutinya menjadikan hubungan Indonesia dan Singapura mengalami pasangsurut politik konfrontasi dengan Malaysia, kerusuhan berbau rasis, hingga sikap curiga pemerintah Singapura terhadap Indonesia ketika Timor-Timur berintegrasi dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-bangsa. Pasang-surut hubungan Indonesia dan Singapura yang disebabkan oleh ketiadaan perjanjian ekstradisi diantara kedua negara ini berjalan sepanjang sejarah berdirinya negara Singapura pada tahun 1965.

Dalam banyak hal, sejarah panjang ketiadaan perjanjian bilateral (ekstradisi) antara Indonesia dan Singapura ditengarai dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan ekonomi-politik kedua negara. Indonesia berkepentingan dalam upaya perbaikan reputasi dengan mengedepankan upaya supremasi hukum (pemberantasan korupsi), sedangkan Singapura berkepentingan untuk menjaga reputasi mereka sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang menganut prinsip, dana bisa masuk dan keluar dengan bebas, termasuk dana konglomerat dari Indonesia.

Dalam perjalanan waktu, ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura seringkali menjadi kendala bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, kedua negara seringkali menggunakan wadah kerjasama multilateral (terutama ASEAN) sebagai wadah untuk berkomunikasi dan memanfaatkan keberadaan Interpol untuk menangani kasus-kasus kejahatan trans-nasional. Efektivitas kedua upaya ini tentunya tidak begitu signifikan, terkendala oleh masalah perbedaan sistem hukum dan kedaulatan masing-masing karena tembok tebal masih menutupinya untuk menuju proses yang lebih jauh lagi.[[2]](#footnote-2)

**B. PERDAGANGAN BEBAS ANTARA INDONESIA-SINGAPURA**

**1. Perdagangan Bebas**

Perdagangan bebas adalah suatu sistem di mana barang, arus modal, dan tenaga kerja secara bebas antara negara-negara, tanpa hambatan yang bisa menghambat proses perdagangan. Banyak negara memiliki perjanjian perdagangan bebas, dan beberapa organisasi internasional mendorong perdagangan bebas antara anggota mereka.

Ada sejumlah argumen baik mendukung dan melawan praktek ini, dari berbagai ekonom, politisi, industri, dan ilmuwan sosial. Sejumlah hambatan perdagangan yang tertimpa dalam perjanjian perdagangan bebas. Pajak, tarif, dan kuota impor semua dihilangkan, seperti subsidi, keringanan pajak, dan bentuk-bentuk dukungan kepada produsen dalam negeri. Pembatasan aliran mata uang juga diangkat, seperti juga peraturan yang dapat dianggap penghalang untuk perdagangan bebas. Sederhananya, perdagangan bebas memungkinkan perusahaan asing untuk berdagang seperti efisien, mudah, dan efektif seperti produsen dalam negeri.

Ide di balik perdagangan bebas adalah bahwa hal itu akan menurunkan harga barang dan jasa dengan mendorong kompetisi. Produsen dalam negeri tidak akan lagi dapat mengandalkan subsidi pemerintah dan bentuk bantuan lainnya, termasuk kuota yang pada dasarnya memaksa warga untuk membeli dari produsen dalam negeri, sementara perusahaan asing dapat membuat terobosan di pasar baru ketika hambatan perdagangan diangkat. Selain mengurangi harga, perdagangan bebas juga seharusnya mendorong inovasi, karena persaingan antar perusahaan memicu kebutuhan untuk datang dengan produk inovatif dan solusi untuk merebut pangsa pasar.

Serangkaian skandal di abad ke-21 awal melibatkan produk makanan tercemar dari Cina menyoroti isu pembelian barang dari negara-negara dengan sistem pengaturan yang buruk. Perdagangan bebas juga dapat mendorong kerja sama internasional, dengan mendorong negara-negara untuk bebas bertukar barang dan warga negara. Perjanjian antara mitra dagang juga dapat mempromosikan keunggulan pendidikan, seperti mengirim insinyur untuk melatih dengan orang-orang di bagian atas bidang teknik dalam satu negara, atau mengirim ahli pertanian ke daerah pedesaan untuk mengajar orang tentang teknik pertanian baru dan praktek keamanan pangan.

Penentang perdagangan bebas sering berpendapat bahwa itu menyakitkan produsen dalam negeri dengan membuka kompetisi untuk perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan undang-undang tenaga kerja yang kurang ketat. Di Uni Eropa, misalnya, ada aturan khusus tentang jam kerja, tarif wajar gaji, kondisi kerja, dan sebagainya, yang menaikkan biaya produksi bagi perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa. Sebaliknya, hukum perburuhan di banyak negara berkembang seperti Honduras jauh lebih longgar, yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan biaya rendah, karena mereka memiliki biaya overhead yang rendah.

Perdagangan bebas juga telah menyuarakan keprihatinan tentang keamanan produk antara beberapa pendukung konsumen. Serangkaian skandal awal di abad ke-21 melibatkan produk makanan tercemar dari Cina yang menyoroti isu pembelian barang dari negara-negara dengan sistem peraturan yang tidak efisien atau tidak lengkap. Orang lain telah menyarankan bahwa perdagangan bebas mendorong perusahaan untuk pindah, karena ketika hambatan perdagangan luar negeri yang diangkat, perusahaan domestik tidak punya alasan untuk tidak memindahkan operasi di luar negeri untuk mengambil keuntungan dari tenaga kerja lebih murah, perlengkapan murah, dan sistem peraturan yang longgar.[[3]](#footnote-3)

**2. Indonesia dan Perdagangan Bebas**

 Saat ini Indonesia terlibat rundingan mengenai perdagangan bebas. Perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Negara mitra (Korea Selatan, India, Iran, Pakistan, Bangladesh, ASEAN, AFTA) berlangsung pada Tahun 2012 ini.

Pengertian Perdagangan bebas secara sederhana ialah perdagangan antara negara tanpa ada hambatan apapun seperti pajak ekspor dan impor. Berkerjasama untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat, yang juga seharusnya saling menguntungkan.

Hal ini dapat berdampak buruk dan juga dapat berdampak baik bagi indonesia. Tergantung dari masing-masing negara yang terlibat.

Perdagangan antar Negara tentu hal yang baik, karena bea cukai dapat memberi masukan pendapatan Negara. Namun dengan adanya perdagangan bebas yaitu 0% untuk biaya ekspor dan impor akan terjadi kebebasan laba dan macam pengaruh yang berbeda bagi tiap negara yang menjalankan khususnya Indonesia. Oleh karena itu setiap negara yang menjalankan harus mampu bersaing dengan baik.

Diharapkan dampak positif yang diterima Indonesia dapat meningkatkan kerja sama yang luas antar negara diharapkan dapat memiliki hubungan yang baik, memberi peluang besar untuk membrantas atau mengurangi pengangguran di Indonesia dengan banyaknya investasi asing ke Indonesia namun jangan sampai kalah saing, dan diharapkan kualitas standar hidup Indonesia semakin lebih baik, makmur, tidak tertinggal atau dapat mengikuti era globalisasi.

Namun bila perdagangan bebas diterapkan di Indonesia. Kelihatannya sungguh memaksakan diri. Pada kenyataannya produk-produk asing di Indonesia banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap harinya untuk macam-macam kebutuhan. Perusahaan asing lebih mendominasi di Indonesia daripada produk dalam negeri sendiri. Tentu ini ketergantungan Indonesia dengan mengimpor.

Hal ini hanya menguntungkan negara asing karena daya saing mereka lebih kuat dari Indonesia. Kebebasan laba negara mitra yang didapat pun lebih besar lagi karena adanya perdagangan bebas, yaitu 0% bea masuk barang dan jasa dari negara-negara yang terlibat.

Kebebasan laba Indonesia yang didapat pun tidaklah baik. Terbukti perusahaan dalam negeri telah dikuasai perusahaan asing 80%. Ini merupakan ancaman bagi ekonomi di Indonesia. Pendapatan negara pun berkurang karena tidak memperoleh bea masuk barang dan jasa dari negara-negara yang terlibat akibat dari kebebasan perdagangan. Tanpa melakukan perdagangan bebaspun pertumbuhan ekonomi di Indonesia belumlah baik.

Seharusnya Indonesia menigkatkan kualitas produk dalam negeri terlebih dahulu untuk mensejahterahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendominasi pada produk-produk asing yang ada di Indonesia. Sebab untuk melakukan perdagangan bebas perlu daya saing yang kuat baik di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi tidak hanya memberi kebebasan laba kepada negara-negara asing yang bebas mengimpor produk ke Indonesia tetapi juga dapat memperoleh kebebasan laba yang lebih tinggi dari kebebasan mengekspor produk ke negara-negara yang terlibat. Seharusnya menjadi perdagangan bebas yang saling menguntungkan.[[4]](#footnote-4)

**3. Singapura dan Perdagangan Bebas**

 Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Ekonomi di Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia, negara dengan angka korupsi sedikit, dan negara yang paling pro bisnis. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari Empat Macan Asia. Pajak di Singapura relatif rendah (14,2% dari PDB). Singapura juga merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. BUMN memainkan peran besar dalam perekonomian Singapura dengan memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan terbesar di Singapura, seperti Singapore Airlines, SingTel, ST Engineering, dan MediaCorp. Investor juga sangat tertarik untuk berinvestasi di Singapura karena iklim investasi yang sangat menarik dan suhu politik yang stabil.

Barang ekspor utama di Singapura berada di sektor elektronik, bahan kimia, dan jasa. Hal itu memungkingkan untuk membeli sumber daya alam dan barang mentah yang tidak ia miliki. Air termasuk langka di Singapura. Maka dari itu, air didefinisikan sebagai sumber daya yang berharga di Singapura bersamaan dengan kelangkaan lahan yang dibantu dengan beberapa proyek reklamasi.

Industri di Singapura dapat dikatakan mengandalkan konsep perantara perdagangan dengan membeli barang-barang mentah dan menyempurnakannya untuk diekspor kembali, seperti pabrik penyulingan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan yang strategis yang membuatnya lebih kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Port of Singapore adalah pelabuhan kargo tersibuk kedua di dunia. Selain itu, infrastruktur pelabuhan dan tenaga kerja yang terampil, yang merupakan hasil dari kebijakan pendidikan dalam memproduksi pekerja terampil, juga menjadi aspek keberhasilan pelabuhan Singapura dalam hal ekspor dan impor.

Pemerintah Singapura mempromosikan tabungan dan investasi melalui berbagai kebijakan seperti *Central Provident Fund*, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan pensiun warganya. Tingkat tabungan di Singapura tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia sejak tahun 1970-an. Sebagian besar perusahaan di Singapura terdaftar sebagai perseroan terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan yang melebihi jumlah modal saham mereka.

Untuk mencapai kemakmuran ekonomi di abad ke-21, Singapura telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan inovasi, mendorong kewirausahaan, melatih tenaga kerja, dan menarik bakat asing. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Singapura, sehingga Singapura tetap kompetitif dan siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

**a. Sejarah Ekonomi di Singapura**

Setelah memperoleh kemerdekaan dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura menghadapi pasar domestik yang kecil serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. 70% keluarga di Singapura tinggal dengan kondisi yang buruk dan penuh sesak. Sepertiga diantaranya tinggal di daerah kumuh di pinggiran kota. Angka pengangguran rata-rata 14%, pendapatan per kapita masih US$ 516, dan setengah dari populasi buta huruf.

Sebagai tanggapan atas berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah Singapura mendirikan Dewan Pembangunan Ekonomi untuk dijadikan tombak investasi dan membuat Singapura sebagai tujuan yang menarik bagi investor asing. Pada tahun 2001 perusahaan asing menyumbang 85% dari sektor ekspor manufaktur. Sementara itu, tabungan dan tingkat investasi di Singapura naik pada tingkat tertinggi di dunia.

Sebagai hasil dari dorongan investasi ini, modal saham Singapura naik hingga 33 kali lipat pada tahun 1992 dan 10 kali lipat peningkatan rasio modal tenaga kerja. Standar hidup terus meningkat. Banyak keluarga yang pindah dari status berpenghasilan rendah ke penghasilan menengah. Sekitar 80% penduduk Singapura merupakan anggota kelas menengah. Angka tabungan yang tinggi berdampak pada negara yang tidak terlalu diberatkan akan jaminan masa depan. Singapura juga telah berhasil mengembangkan tenaga kerja yang terampil, mandiri, dan berpengalaman untuk ekonomi global.

Strategi ekonomi Singapura menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% dari tahun 1960 sampai 1999. Pertumbuhan ekonomi kembali turun setelah krisis keuangan di kawasan regional pada tahun 1999 yakni sebesar 5,4%. Namun kembali naik ke 9,9% pada tahun 2000. Pada tahun 2001 terjadi penurunan ekonomi sebesar 2%. Hal ini dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Ekonomi tumbuh sebesar 2,2% pada tahun berikutnya, dan 1,1% pada tahun 2003 ketika terdapat wabah SARS di Singapura. Selanjutnya, perubahan besar kembali terjadi pada tahun 2004 sehingga pertumbuhan ekonomi kembali ke angka 8,3%. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% dan pada tahun 2006 sebesar 7,9%. Pada tanggal 8 Juni 2013, angka pengangguran di Singapura sekitar 1,9%.

**b. Perusahaan Negara dan Investasi di Singapura**

Perusahaan pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian di Singapura. Perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian milik negara ini beroperasi secara komersial dan tidak ada keunggulan kompetitif atas perusahaan milik pribadi. Kepemilikan negara menonjol di sektor-sektor strategis perekonomian seperti telekomunikasi, media, transportasi umum, pertahanan, pelabuhan, operasi bandara serta perbankan, pengiriman, maskapai penerbangan, infrastruktur, dan real estate.

**c. Sektor Perekonomian di Singapura**

Manufaktur dan jasa keuangan menyumbang masing-masing 26% dan 22% dari produk domestik bruto Singapura pada tahun 2000. Industri elektronik memimpin sektor manufaktur Singapura yakni sekitar 48% dari total output industri, tetapi pemerintah juga memprioritaskan pengembangan industri bahan kimia dan bioteknologi.

Untuk mempertahankan persaingan di tengah meningkatnya upah, pemerintah berusaha untuk mempromosikan aktivitas nilai tambah di sektor manufaktur dan jasa. Pemerintah juga telah melakukan beberapa tindakan seperti pengendalian upah dan pelepasan bangunan yang tidak digunakan dalam upaya untuk mengendalikan kenaikan harga sewa komersial. Tujuannya untuk menurunkan biaya melakukan bisnis di Singapura ketika biaya sewa kantor di distrik pusat bisnis naik tiga kali lipat pada tahun 2006.

### 1) Perbankan di Singapura

Singapura dianggap sebagai pusat keuangan global, dengan bank Singapura yang menawarkan fasilitas rekening perusahaan kelas dunia. Hal ini termasuk berbagai mata uang, internet banking, telephone banking, rekening koran, rekening tabungan, debit dan kartu kredit, deposito berjangka tetap, dan layanan wealth management.

### 2) Bioteknologi di Singapura

Singapura agresip mempromosikan dan mengembangkan perusahaan industri bioteknologi. Seratus juga dolar diinvestasikan ke sektor bioteknologi untuk membangun infrastruktur, dana penelitian dan pengembangan, dan merekrut ilmuwan internasional ke Singapura. Pembuat obat terkemuka seperti GlaxoSmithKline (GSK), Pfizer, dan Merck & Co, telah mendirikan pabrik di Singapura. Pada tanggal 8 Juni 2006, GSK mengumumkan bahwa ia akan berinvestasi sebesar S$ 300 juta untuk membangun pabrik vaksin anak, yang merupakan fasilitas pertama di Asia.

### 3) Energi dan Infrastruktur di Singapura

Singapura adalah pusat perdagangan minyak di Asia. Industri minyak merupakan 5% dari PDB Singapura. Singapura adalah salah satu dari tiga pusat ekspor penyulingan di dunia. Pada tahun 2007 Singapura mengekspor 68 juta ton minyak. Industri minyak telah menarik industri kimia dan manufaktur peralatan minyak dan gas.

Singapura memimpin 20% pasar dunia dalam bidang perbaikan kapal. Pada tahun 2008 industri kelautan dan lepas pantai memperkerjakan hampir 70.000 pekerja.

**d. Perdagangan, Investasi, dan Bantuan di Singapura**

Perdagangan di Singapura pada tahun 2000 sebesar S$ 373 miliar. Meningkat 21% dari tahun 1999. Singapura saat ini merupakan mitra dagang terbesar kelima belas dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2000, impor di Singapura mencapai $ 135 milyar dan ekspor mencapai $ 138 miliar. Malaysia adalah sumber impor utama Singapura, serta pasar ekspor terbesar yakni 18% dari total ekspor Singapura.

Re-ekspor menyumbang 43% dari total penjualan Singapura ke negara lain pada tahun 2000. Ekspor utama Singapura adalah produk minyak bumi, makanan/minuman, bahan kimia, tekstil/garmen, komponen elektronik, peralatan telekomunikasi, dan peralatan transportasi. Sedangkan impor utama Singapura adalah pesawat, minyak mentah dan produk minyak bumi, komponen elektronik, radio dan televisi, kendaraan bermotor, bahan kimia, makanan/minuman, besi/baja, dan benang tekstil/kain.

Singapura memiliki akses perdagangan bebas di ASEAN, dengan bea masuk dikurangi ketika berhadapan dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darusalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.

Amerika Serikat memimpin dalam investasi asing di Singapura. Pada tahun 1999, investasi kumulatif untuk manufaktur dan jasa oleh perusahaan-perusahaan AS di Singapura mencapai sekitar $ 20 milyar. Sebagian besar investasi AS di bidang manufaktur elektronik, penyulingan minyak dan penyimpanan minyak, dan industri kimia. Lebih dari 1.500 perusahaan AS beroperasi di Singapura.

Pemerintah Singapura dikenal bebas korupsi, terampil, memiliki infrastruktur yang canggih dan efisien. Hal tersebut telah menarik investasi dari lebih dari 3.000 perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Perusahaan-perusahaan asing tersebut ditemukan di hampir setiap sektor ekonomi. Meskipun sektor jasa tertentu tetap didominasi oleh perusahaan terkait dengan pemerintah.

Pemerintah juga telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di luar Singapura. Pada akhir tahun 1998, jumlah investasi di luar negeri mencapai $ 39 milyar. Republik Rakyat Tiongkok menjadi tujuan investasi utama yaitu sekitar 14%. Kemudian diikuti oleh Malaysia (14%), Hong Kong (8,9%), Indonesia (8%), dan Amerika Serikat (4%). India, yang ekonominya berkembang pesat terutama dari sektor teknologi, menjadi sumber berkembangnya investasi asing untuk Singapura.

Amerika Serikat tidak memberikan bantuan bilateral ke Singapura, tetapi AS tampaknya tertarik untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Singapura. Pajak perusahaan Singapura adalah 17 persen.

**e. Tenaga Kerja di Singapura**

Pada tahun 2000, Singapura memiliki tenaga kerja sekitar 2,2 juta. Negara ini memiliki kemampuan berbahasa Inggris terbesar di Asia. Hal itu menjadikannya sebagai tempat yang menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Pengangguran di Singapura terbilang sangat sedikit, yaitu sekitar 1,9% pada tahun 2012.

**f. Keuangan Publik di Singapura**

Belanja pemerintah di Singapura telah meningkat sejak awal krisis keuangan global, dari sekitar 15% dari PDB pada tahun 2008 menjadi 17% pada tahun 2012. Pemerintah tidak memiliki utang luar negeri dan surplus anggaran yang konsisten. Utang pemerintah Singapura dikeluarkan untuk tujuan investasi, bukan untuk kebutuhan fiskal.

Pajak penghasilan pribadi Singapura sekitar 0% sampai 20% untuk pendapatan di atas S$ 320.000. Tidak ada pajak warisan di Singapura. Tarif pajak penghasilan perusahaan di Singapura sekitar 17% dengan pengecualian kepada usaha kecil.

Pada bulan April 2013, Singapura diakui sebagai surga bari para orang kaya karena pajak penghasilan pribadi yang rendah serta pembebasan pajak pada pendapatan yang dihasilkan di luar Singapura. Banyak orang-orang terkaya di dunia yang pindah kewarganegaraan ke Singapura.

**g. Kebijakan Moneter di Singapura**

Monetary Authority of Singapore (MAS) adalah bank sentral Singapura dan otoritas peraturan keuangan. Bank sentral ini mengelola berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan uang, perbankan, asuransi, sekuritas, penerbitan uang, dan sektor keuangan pada umumnya. MAS telah diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai bankir dan agen keuangan pemerintah. MAS juga telah dipercaya untuk melakukan stabilitas moneter dan kebijakan kredit bagi pertumbuhan ekonomi. MAS tidak mengatur sistem moneter melalui suku bunga, melainkan dengan melakukan intervensi di pasar Dolar Singapura.[[5]](#footnote-5)

**C. KEBIJKAN INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PERDAGANGAN BEBAS**

 Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung guna memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk kegiatan perdagangan internasional. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan itu dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.

2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya.

3. Perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya baik dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya.

4. Sumber daya alam yang berbeda.

M acam-macam kebijakan pemerintah:

a. Kebijakan proteksi

Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh *(infant industry*), dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semena-mena dengan kelebihan yang ia miliki, selain itu persaingan-persaingan barang-barang impor.

Tujuan kebijakan proteksi adalah:

1. Memaksimalkan produksi dalam negeri.
2. Memperluas lapangan kerja.
3. Memelihara tradisional.
4. Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan.
5. Menjaga stabilitas nasional, dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.

Kebijakan proteksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Tarif

 Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang dagangn yng melintasi daerah pabean (*cutom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga meningkatkan pendapatan negara dan juga membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

Macam-macam penentuan tarif, yaitu:

1. Bea Ekspor *(export duties*) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain.

2. Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain.

3. Bea Impor (*import duties*) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara.

b. Kuota

 Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Ada tiga macam kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota impor adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diimpor, kuota produksi adalah pembatasan dalam jumlah barang yang di produksi, dan kuota ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor.

 Tujuan diberlakukannya kuota impor diantaranya:

1. Mencegah barang-barang yang penting berada di luar negeri.

2. Menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup.

3. Mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri.

c. Dumping

 Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan dibawah biaya produksi. Kebijakan ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan antidumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering disebut *countervailing duties*. Hal ini dilakukan untuk menetralisir dampak subsidi ekspor yang diberikan oleh negara lain. *Predatory dumping* dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan *predatory dumping*.

 Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:

1. Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada luar negeri, sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva permintaan di luar negeri.

2. Terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri.

d. Subsidi

 Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus ke arah perang subsidi.

e. Larangan Impor

 Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.

b. Kebijakan Perdagangan Bebas

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan pemerintah yang menghendaki perdagangan internasional berlangsung tanpa adanya hambatan apapun. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan ini beralasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan setiap negara berspesialisasi memproduksi barang dan menjadikannya keunggulan komparatif.

c. Kebijakan autarki

Kebijakan autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas.

Liberalisasi perekonomian di Singapura.

Alasan Singapura melakukan liberalisasi ialah karena negara Singapura sejak awal melakukan keterbukaan, rasa ketidak amanan adalah argumen penting yang membuat pemerintah Singapura tetap ikut aktif berpartisipasi mengamankan kepentingan ekonomi politiknya. Salah satunya disebabkan karena kondisi Singapura sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam. Dalam argumentasi Joseph Nye, kekuatan yang diandalkan Singapura adalah kekuatan ekonomi sebagai *Soft power*. Ini dibuktikan pada kemampuan Singapura tumbuh sebagai negara-kota yang mempunyai kemajuan ekonomi yang tinggi, dan mampu untuk memperjuangkan kepentingannya diperundingan multilateral. *Soft power* ini digunakan Singapura untuk menjaga keberlangsungan keamanan ekonomi politiknya.

Mengadopsi pemikiran Christoper M. Dent, upaya pemerintah Singapura dalam melakukan liberalisasi dan negosiasi multilateral adalah untuk menjaga *supply security, market access security, Finance-credit security,* dan *techno-industrian capability security.[[6]](#footnote-6)*

Pertama adalah *Supplay Security* sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam, pasokan sumber daya sebagai sumber produksi Singapura adalah dari negara lain. Kondisi ini membuat Singapura harus terus menjaga hubungan dengan negara-negara yang terdekat yaitu dengan Asia Tenggara. Maka Asia Tenggara merupakan kawasan yang penting bagi keamanan pasokannya. Lewat AFTA, Singapura dapat mengupayakan hilangnya hambatan ekspor dari negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia sebagai distributor sumberdaya utama bagi Singapura. Selain itu terbuka kesempatan untuk menanamkan investasi industri Singapura yang mengelola sumberdaya alam di negara tetangga. Isu pasokan air dan minyak merupakan isu yang selalu mencuat dalam negosiasi Singapura dengan negara tetangga. Upaya ekspansi jangkauan Singapura ke Batam dan Johor misalnya lewat penanaman investasi adalah salah satu upaya untuk mengamankan pasokan sumber daya itu. AFTA dan WTO mewajibkan lingkup investasi yang bebas. Pasokan mencari kebutuhan dasar ini juga menggerakkan Singapura mencari sumber-sumber yang lebih mudah untuk memasok sumber daya ke Singapura.

Kedua adalah market *access security*, atau keamanan akses pasar. Dalam penjabaran sebelumnya mengenai area kepentingan Singapura di kedua level yaitu multilateralisme global dan regional, selalu dinyatakan bahwa kepentingan Singapura adalah memperoleh kepastian akses pasar bagi industri domestiknya. Singapura sangat bergantung kepada pedagang terutama ekspor manufaktur dan jasa, maka akses pasar ini sangat penting. Kekhawatiran Singapura adalah jika negara-negara maju menutup jalur masuk ekspor Singapura, maka akan berdampak resesi ekonomi dalam negeri. Bagi Singapura ASEAN merupakan pasar baru bagi produksi industrinya. Alasannya beberapa negara ASEAN mempunyai potensi ekonomi yang besar dan akan menghasilkan tingkat konsumsi yang besar. Upaya untuk memperoleh keamanan akses pasar diupayakan pemerintah Singapura tidak hanya dari negosiasi kepentingan Singapura dikerangka kerjasama global dan regional. Singapura juga aktif mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang dianggap memberikan keuntungan besar. Singapura juga menjalin kerjasama perdagangan bebas bilateral selain dengan Indonesia antara lain dengan New Zeland pada *Agreement betwen New Zeland and Singapore on a Closer Economic Parthnership* (ANZSCEP).[[7]](#footnote-7)

Ketiga adalah *Finance-credit* security ini berhubungan dengan bagaimana Singapura manjaga keamanan finansialnya dalam linglup eksternal. Sebagai negara kecil yang rawan akan goncangan keuangan, Singapura mengandalkan cadangan devisa yang besar, serta sehatnya perekonomian dalam negeri. Didalam perundingan multilateral, area kebebasan investasi membuat Singapura merasa yakin dapat meningkatkan keamanan finansial dengan mengadakan investasi besar-besaran di luar negeri. Dengan menyepakati TRIMs di WTO dan AIA di ASEAN, menunjukkan besarnya kepentingan Singapura di sektor investasi. Investasi tidak hanya investasi langsung tapi juga meliputi investasi portopolio yang dapat meningkatkan cadangan devisa.

Terakhir keempat adalah *techno-industrian capability security*, ditujukan pada industri-industri Singapura sejak awal. Singapura ingin memajukan industri yang bersifat teknologi tinggi dan pengetahuan *Knowledge-Based Economy* (KBE) sebagai industri utama. Program regionalisasi GLC (*goverment linked corporation*) adalah cara untuk mendapatkan akses teknologi. Cara ini ditempuh melalui negosiasi multilateral atau bilateral dengan negara-negara maju umumnya pada komoditas elektronik. Upaya pemerintah untuk memajukan industri ini dilakukan dengan investasi GLC di negara-negara maju, seperti yang dilakukan Singtel.

Ada tiga karakteristik dalam menerapkan langkah-langkah kebijakan ekonomi Singapura menurut Ralph Bryant[[8]](#footnote-8):

* 1. Pemerintah Singapura akan selalu meningkatkan lokasi aktifitas financial Singapura, antara lain untuk mengupayakan Singapura menjadi pusat finansial di kawasan.
	2. Karakter kedua adalah adanya upaya untuk menjaga satu perbedaan insentif dan hambatan antara urusan finansial domestik dan internasional. Ini yang disebut dengan ‘pagar pemisah’. Pagar pemisah ini melindungi beberapa aktifitas finansial domestik dari gangguan eksternal terutama transaksi internasional yang penggeraknya dapat menggoyang ekonomi Singapura. Pertimbangan awal dari diadakannya pagar pemisah ini adalah untuk mengisolasi ekonomi domestik dengan ekonomi dunia.

Pertimbangannya adalah sebagai negara kecil yang sangat terbuka pada awalnya, yang mau tidak mau harus berhati-hati dalam segala perencanaan dan pelaksanaan tindakan ekonomi. Namun kerakter ini tidak dapat diartikan terlalu ketat menurut Bryant karena tingkat pagar pemisah ini dapat berubah-ubahseiring dengan waktu dan program liberalisasi.

* 1. Karakter ketiga adalah adanya keinginan untuk menjamin ketahanan dan kematangan dari kegiatan finansial Singapura. Kebijakan dari Bank Sentral dan institusi finansial lain dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan ini. Motif makro nya adalah menstabilkan sistim finansial secara keseluruhan, dan motif mikro nya adalah melindungi depositor dan investor individualuntuk memainkan peranan dalam mendukung regulasi dan supervisi dari Bank.

Dapat diketahui dari pemikiran diatas bahwa ide politik awalnya Singapura adalah untuk menjadikan posisinya sebagai pusat finansial. Penerapan pagar pemisah ini akan berpengaruh dalam penerapan liberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan Singapura. Penjelasannya bermula dari adanya perdebatan pagar pemisah tersebut dengan karakter untuk mempromosikan Singapura menjadi suatu pusat finansial. Terkadang pagar pemisah itu sangat terlalu protektif sehingga menghambat keterbukaan dalam proses menuju keterbukaan. Pemerintah Singapura juga dianggap terlalu berlebihan dalam menerapkan pembatasan-pembatasan sehingga membatasi arus masuk institusi finansial asing.

1. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/225836-perdagangan-ri-singapura-siapa-lebih-unggul> Diakses pada tanggal 20 September 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://fiktorpobatu.blogspot.co.id/2014/11/hubungan-kerjasama-indonesia-singapura.html> Diakses pada tanggal 20 September 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.sridianti.com/pengertian-perdagangan-bebas.html> Diakses pada tanggal 20 September 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://gena-enka.blogspot.co.id/2012/04/indonesia-dan-perdagangan-bebas.html> Diakses pada tanggal 20 September 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/08/keadaan-ekonomi-di-singapura-artikel.html> Diakses pada tanggal 20 September 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. Christopher M. Dent, dalam “Singapore’s Foreign economic policy: The Pursuit of Economic Security”, dalam Contemporary Southeast Asia, Vol. 23, no. 1, April 2001, hal 7-8. – LIBERALISASI KEBIJAKAN EKONOMI SINGAPURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG SINGAPURA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM

 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rules of Origin Singapore’s Concluded FTA, diambil dari website <http://www.mti.gov.sg/public/FTA/frm_FTA_Default.asp?sid=152&sid=1529> - LIBERALISASI KEBIJAKAN EKONOMI SINGAPURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG SINGAPURA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM [↑](#footnote-ref-7)
8. Ralph C. Bryant, “The Evolution of Singapore as A Financial Centre” dalam Kernial Singh Sandhu dan Paul Wheatley (ed.), *Management of Succes, the Mouldingof Modern Singapore* (Singapore:ISEAS,1990), hal 338. - LIBERALISASI KEBIJAKAN EKONOMI SINGAPURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG SINGAPURA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM [↑](#footnote-ref-8)